

# PERSETUJUAN PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NIUGINI

R.S. ROOSMAN

Dengan diberinya kemerdekaan dari tangan Australia pada tanggal 16 September 1975, Papua New Guinea atau Papua Niugini — disingkat PNG — memasuki fase baru dalam diplomasi politik dengan Indonesia. Dengan mewarisi masalah-masalah — terutama gerakan OPM di Irian Jaya yang suka mempergunakan perbatasan sebagai suaka, dan dengan mengalirnya pelarian dari Irian Jaya semenjak tahun 1963 — mau tak mau maka PNG terlibat dalam masalah internasional yang rawan dengan tetangganya, ialah persoalan perbatasan.

Semula para pemimpin PNG — terpengaruh oleh suara-suara kalangan-kalangan tertentu di PNG yang menunjukkan simpatinya terhadap "nasib saudara-saudara serumpun mereka di sebelah sana perbatasan", "seakan-akan tak tahu bagaimana harus menentukan sikap mereka". Mula-mula mereka lebih condong memihak kalangan-kalangan tersebut. Nyatalah api yang menimbulkan sentimen anti Indonesia di PNG sering membara karena dikipasi oleh golongan pelarian yang telah lama bermukim di PNG. Demikian pula oleh kalangan akademis dengan didalangi oleh sementara dosen sospol pada University of Papua New Guinea (UPNG) yang didatangkan dari Australia, New Zealand dan negara-negara Barat lainnya dan ternyata berhaluan kekiri-kirian.

Terutama disebabkan oleh peristiwa-peristiwa politik akhir-akhir ini yang terjadi di sekitar wilayah ASEAN, maka Indonesia — dalam kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap tetangga-tetangganya — lebih condong memberikan prioritas kepada ASEAN daripada PNG,

"pintu belakangnya". Sementara penjagaan "pintu belakang" ini tak dilalaikan pula dengan menempatkan kurang lebih dua puluh lima ribu tentara di Irian Jaya.

Gerakan OPM mengusik Pemerintah Indonesia dalam usaha mengkonsolidasi pemerintahannya dan pembangunannya di Irian Jaya. Gerakan OPM dianggap pemberontakan melawan negara, maka terlarang di Indonesia. Namun hingga akhir tahun 1978 gembong-gembongnya masih diperkenankan keluar-masuk PNG, malahan berembuk dengan para pemimpin Pemerintah PNG perihal "kemungkinan-kemungkinan berdamai dengan Pemerintah Indonesia". Bagi Indonesia hal serupa ini sukar dapat diterima, apalagi setelah Pemerintah PNG mengetahui benar-benar, bagaimana pendirian Indonesia itu.

Melihat sikap para pemimpin PNG yang tak menentu, dan demi "stabilitas politik" di daerah perbatasan itulah, maka Indonesia berusaha untuk minta perumusan yang lebih tegas dari pihak PNG mengenai soal perbatasan. Jika seandainya sentimen anti-Indonesia di PNG sampai merembes ke kalangan tokoh-tokoh pemerintahan, maka keadaan semacam ini akan merupakan ujian kepada toleransi pihak Indonesia, karena mungkin akan dianggap "membahayakan stabilitas politik" di daerah itu. Yang rupa-rupanya dimaksudkan oleh Indonesia dengan "stabilitas politik" adalah adanya satu negara PNG yang kuat, bersatu, dan pro-Indonesia. Maka gerakan separatis, seperti "Papua Besena" yang dipimpin oleh Miss Josephine Abaijah — yang mau melepaskan Papua dari PNG — senantiasa dicurigai oleh kaum berpolitik di Jakarta, karena dikuatirkan akan melemahkan kesatuan ini. Menilik ucapan-ucapan pemimpin "Papua Besena" (artinya: "Papua, inilah tanahku") ini pernah diutarakannya, bahwa "lebih baik PNG berorientasi kepada Indonesia daripada kepada Australia — suatu negara Barat yang teramat majunya". Disarankannya pula supaya "PNG bergabung saja dengan Indonesia", tetapi tak pernah pikirannya ini dianggap serius, baik oleh umum di PNG maupun oleh pihak Indonesia sendiri, karena pertimbangan politik. Pernah Jakarta risaukan pula persoalan Bougainville — di mana terdapat tambang tembaga yang menghasilkan 30% dari anggaran belanja nasional PNG — yang dahulunya hendak melepaskan diri juga dari kesatuan PNG, tetapi dengan cepat dan bijaksana dapat diselesaikan oleh bekas PM Somare.

Maka bisa dimengerti mengapa usaha pertama yang diutamakan untuk meletakkan dasar hubungan baik antara kedua negara itu berupa menyelesaikan persoalan tentang persetujuan perbatasan (border agreement). Para pemimpin PNG akhirnya menyadari, bahwa kepentingan nasional harus didahulukan, sebagaimana pernah diucapkan oleh seorang tokoh Pemerintah PNG: "Buat apa kepentingan rakyat kita yang berjumlah tiga juta itu harus dikorbankan, karena sekelompok kecil pelarian saja?" (Diperkirakan ada 5.000 orang pelarian di PNG).

Bagi PNG yang angkatan bersenjatanya hanya terdiri dari paling banyak 3.000 — 5.000 tentara Pacific Islands Regiment saja, pertahanannya masih sangat tergantung dari bantuan dari luar, maka — sadar akan kemampuannya sendiri — politik yang lebih realistis kemudian mereka tempuh dalam hubungan mereka dengan Indonesia.

PNG telah menyatakan "universalisme" sebagai filsafat negaranya yang oleh Sir Maori Kiki — bekas Menteri Luar Negeri dan Perdagangan PNG — diucapkan di hadapan Majelis Umum PBB pada tanggal 17 September 1976 sebagai berikut:

"Universalisme berarti mengambil jalan tengah tanpa membelok ke kiri ataupun ke kanan mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ideologi politik, kepercayaan ataupun sistem pemerintahan yang berlainan. Kami memandangnya sebagai kebijaksanaan yang seimbang, maka secara demikian PNG tidak akan mempunyai musuh."

Apakah filsafat "universalisme" dalam dunia sekarang ini di mana negara-negara suka blok-blok, dan terang tampak ada kecenderungan untuk membentuk pengelompokan-pengelompokan regional — akhirnya dapat dipertahankan oleh negara kecil seperti PNG, inilah yang menjadi pertanyaan.

Namun dalam politik luar negerinya PNG berhati-hati, buktinya dengan tegas menolak diadakannya Kedutaan Rusia dan RRC di ibukota Port Moresby, berhubung "PNG tak mampu menyediakan tempat beserta fasilitasnya". Segala gerak-gerik Rusia di daerah Pasifik Selatan selalu diamat-amati oleh Australia, Inggris, Selandia Baru dan Amerika yang kesemuanya mempunyai kepentingannya masing-masing, dan memegang peranan penting di kawasan Pasifik Selatan.

Sejak semula PNG berorientasi ke daerah Pasifik Selatan, dan bekas Perdana Menteri Somare sendiri memberi identitas kepada negerinya sebagai negara Pasifik; secara diplomatis ia sering

menyebutkan negaranya sebagai "jembatan antara Pasifik Selatan dan Asia". Dalam pengelompokan regional, serentak menjadi merdeka maka PNG masuk menjadi anggota South Pacific Forum (SPF), ialah persatuan kerja sama regional yang terdiri dari negara-negara mini di Pasifik Selatan. Dalam SPF ini PNG muncul sebagai anggota yang paling banyak penduduknya (tiga juta), lagi pula dalam banyak bidang yang paling maju. Selalu dipersoalkan oleh kalangan berpölitik di Port Moresby, apakah tidak sebaiknya PNG masuk ASEAN juga. Ada pertimbangan, bahwa sebagai anggota penuh PNG bisa memegang peranan utama dalam SPF dengan mendapat tempat terhormat dan suaranya didengar, sedangkan kalau PNG masuk ASEAN, di mana ia mendapat kedudukan sebagai observer saja, halnya akan berlainan.

Aliansi PNG dalam SPF ini terutama bersifat idealistis, dan dalam perumusannya merupakan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam prakteknya, secara ekonomis PNG tidak mendapat keuntungan dari keanggotaannya di SPF. Hubungan ekonomi yang terbanyak ialah dengan Asia, terutama Jepang. Pengimporan barang keperluan sehari-hari yang sudah jadi berlangsung ke PNG dari negara-negara Asia, ialah dari RRC (via Hongkong), Taiwan, Korea, Jepang, Pilipina, Malaysia, Thailand dan Singapura. Hubungan perdagangan langsung dengan Indonesia rupanya belum berjalan, biasanya barang-barang buatan Indonesia sampai ke PNG lewat Singapura. Dibandingkan dengan impor dari Australia yang memborong 40% dari semua impor ke PNG, impor dari negara-negara Asia tersebut boleh dikatakan kecil.

Dalam bidang sosial-budaya ada sedikit pertukaran delegasi-delegasi pemerintahan, mahasiswa, olahraga dan kesenian antara PNG dengan anggota-anggota SPF lainnya. Yang penting dalam pengelompokan regional ini ialah membentuk perasaan bersatu dan senasib dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya untuk menyatupadukan suaranya terhadap masalah-masalah yang menyinggung kepentingan bersama, misalnya dengan serentak menentang percobaan-percobaan nuklir oleh Perancis di Kepulauan Polynesia Perancis, mempercepat proses dekolonisasi untuk daerah Kaledoni Perancis dan New Hebrides, dan melindungi kepentingan perikanan negara-negara Pasifik Selatan dengan menentukan 200 mil perbatasan perairan mereka masing-masing.

Adapun mengenai hubungan Indonesia dengan PNG, sebelum kemerdekaan PNG telah diadakan pendekatan pada tingkat pemerintah dengan mengirimkan rombongan Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Isnaeni. Itulah pertama kali suatu delegasi Indonesia bertemu dengan Michael Somare dan pemimpin-pemimpin PNG lainnya. Setelah PNG menerima kemerdekaannya dalam tahun 1975, saling berkunjung oleh pejabat-pejabat tinggi, termasuk perdana menteri, menteri-menteri dan pejabat-pejabat lainnya, seolah-olah menjadi rutin. Pada akhir tahun 1979 datang pula rombongan Kadin (Kamar Dagang Indonesia) dari Jayapura ke Port Moresby. Banyak pejabat PNG telah diundang melawat ke Jakarta untuk meninjau, atau mendapat kursus dalam berbagai bidang. Oleh pihak Indonesia telah banyak diikhtirakan untuk memupuk goodwill di kalangan pemerintah maupun rakyat PNG, misalnya dengan mengirimkan rombongan-rombongan kesenian dan olahraga. Undangan-undangan serta penjamuan semua tamu-tamu ini dan pengiriman rombongan-rombongan menelan biaya banyak sekali bagi Indonesia, dan sudah selayaknyalah kita ingin melihat hasil pengeluaran uang negara yang begitu banyak itu berupa imbalan dari pihak sana. Namun dari pihak PNG belum tampak ada usaha timbal-balik semacam itu.

Adalah menarik sekali mengikuti perbincangan mengenai "Rencana Persetujuan Perbatasan" yang diadakan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan PNG Mr. Ebia Olewale, dengan mengambil beberapa bagian dari pernyataan mereka bersama (Joint Ministerial Statement) yang dikeluarkan selama kunjungan Prof. Mochtar ke Port Moresby, dari tanggal 11-14 Desember 1978:

"Kedua menteri menunjuk kepada pernyataan menteri bersama yang dibuat pada bulan Mei, dan menyatakan kesungguhan hati mereka agar perjanjian kerja sama yang mereka buat itu dilaksanakan dalam suatu bentuk yang praktis dan konkrit. Untuk keperluan ini maka kedua menteri setuju bahwa sekarang tibalah waktunya untuk memajukan perdagangan langsung antara kedua negara, dan mencatat bahwa sebagai langkah pertama hendaknya perdagangan dimajukan antara Irian Jaya dengan propinsi-propinsi PNG yang sebelah-menyebelah dengan Irian Jaya. Secara resmi Menteri Luar Negeri Indonesia menawarkan bermacam-macam bantuan teknis kepada Pemerintah PNG yang mungkin dapat berguna bagi PNG, seperti Keluarga Berencana, perikanan dan peternakan."

Sekedar komentar perlu diberi sebagai berikut: Kesulitan dengan perdagangan langsung antara Irian Jaya dengan propinsi-propinsi barat PNG ialah menyangkut berbagai persoalan. Pertama, Irian Jaya dan

PNG memproduksi barang-barang yang sama, dan kedua-duanya mendasarkan ekonominya pada ekspor ke luar daerah/negeri. Tak ada barang yang dihasilkan di Irian Jaya, yang tak bisa didapatkan di daerah PNG, kecuali minyak tanah (petroleum) yang sampai sekarang belum diketemukan di daerah PNG. Mungkin Irian Jaya hanya bisa menyaingi PNG dengan mencatat harga-harganya yang lebih rendah. Kedua, soal pengangkutan lewat darai — yang di kedua belah perbatasan hampir tidak ada jalannya antara PNG dan Irian Jaya, semua pengangkutan harus lewat laut ataupun udara. Ketiga, mungkin dari pihak PNG perdagangan lebih mudah terlaksana daripada dari pihak Irian Jaya — yang sebagai propinsi selalu memerlukan "clearance" dari pusat Jakarta yang jauh jaraknya dan makan banyak waktu. Kesulitan ini mengenai persoalan administrasi dan birokrasi semata-mata. Kesukaran yang terakhir ialah mengenai soal kesanggupan dan kerelaan para komandan ketentaraan dan badan keamanan di Irian Jaya untuk meredakan sedikit ketegangan yang terdapat di Irian Jaya berhubung dengan kesiapsiagaan dan penjagaan yang amat ketatnya, karena di mana-mana dicurigai aktivitas OPM. Dalam suasana yang demikian ini amat sukar melaksanakan perdagangan bebas (free trade).

Dalam soal bantuan dalam bidang perikanan dan peternakan Indonesia masih bisa mengulurkan tangannya, tetapi dalam family planning Indonesia sendiri belum berhasil menekan peledakan kependudukannya yang masih 2½% setahun tambahannya dengan segala usaha Keluarga Berencananya, sedang PNG mempunyai wilayah seluas Perancis — yang umumnya subur dan banyak belum digarap, lagi penduduknya hanya berjumlah 3 juta orang.

Selanjutnya teks "Joint Ministerial Statement" mengungkapkan:

"Kedua menteri memperhatikan keadaan sekarang ini mengenai penentuan perbatasan antara kedua negara sehubungan dengan tanah, laut dan dasar laut (seabed). Mereka memperhatikan pula pandangan kedua pemerintah mereka, bahwa perbatasan ini telah ditetapkan dengan persetujuan pada tahun-tahun 1971 dan 1973 yang diselesaikan oleh Indonesia dan Australia.

Kedua menteri memperhatikan, bahwa perlu diadakan suatu persetujuan terakhir mengenai sebagian perbatasan laut dan dasar laut di sebelah utara Pulau Irian (New Guinea) yang pada dasarnya telah disetujui dalam persetujuan tahun 1971. Telah disetujui pula, bahwa para pejabat akan bertemu dalam bulan-bulan yang datang ini untuk melaksanakan hal ini.

Kedua menteri memperhatikan pula, bahwa soal-soal administratif tertentu mengenai perbatasan telah menjadi pokok persetujuan yang telah berlalu pada tahun 1974 yang dibuat oleh Indonesia di satu pihak dan Australia di pihak lain atas nama pemerintahnya dan atas nama Pemerintah PNG. Kedua menteri menyatakan pandangannya bahwa persetujuan ini bersifat sementara sekedar untuk menghadapi keadaan waktu itu. Sekarang persetujuan ini

harus ditinjau kembali, seperti dituntut ketentuan-ketentuannya, dengan maksud untuk menggantinya dengan persetujuan baru yang akan dirundingkan dalam hubungannya dengan pengalaman-pengalaman sejak tahun 1974, serta untuk memenuhi keperluan-keperluan situasi sekarang ini.

Mr. Olewale menerangkan kepada Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa usul-usul tertentu sedang diolah untuk mempergunakan Sungai Fly selaku sarana pengangkutan untuk melayani proyek pertambangan Ok Tedi. Walaupun belum diambil keputusan terakhir mengenai proyek ini, teranglah sudah, bahwa jikalau proyek ini diteruskan — pemakaian sungai ini sebagai sarana sungai (waterway) akan merupakan hal yang sangat penting. Telah disetujui, bahwa pemerintah kedua negara akan saling minta nasihat dan bekerja sama mengenai tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencegah pencemaran (pollution) sungai ini dan mempermudah pelayaran sepanjang sungai.

Diperhatikan pula bahwa perlu diadakan survei untuk penentuan perbatasan secara fisik. Ahli-ahli perpetaan harus berunding untuk menentukan cara-cara yang terbaik untuk menentukan hal ini.

Dalam garis besarnya Mr. Olewale memberikan kepada rekannya dari Indonesia suatu gambaran daripada tindakan-tindakan yang telah diambil oleh PNG untuk menetapkan 200 mil daerah perikanan beserta kebijaksanaan PNG mengenai pengelolaan sumber-sumber daya hayati (living resources) dalam zonanya. Prof. Mochtar Kusumaatmadja menerangkan, bahwa Indonesia di kelak kemudian hari akan mempunyai daerah 200 milnya sendiri. Kedua menteri mencatat bahwa pada sebaiknya kedua pemerintah bekerja sama dalam pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber daya perikanan dalam daerah kekuasaan hukum (jurisdiction) mereka masing-masing, terutama mengenai persediaan (stock) ikan cakalang (tuna) yang mungkin mengikuti pola berpindah-pindah (migratory pattern) melintasi zone-zone yang sebelah-menyebelah.

Mr. Olewale memberi gambaran kepada rekannya dari Indonesia mengenai perkembangan-perkembangan yang telah berlangsung ke arah pembentukan suatu South Pacific Regional Fisheries Agency. Prof. Mochtar Kusumaatmadja menaruh perhatian atas informasi ini.

Mr. Olewale mengatakan, bahwa PNG mungkin akan melanjutkan penerapan rezim sistem kepulauan (archipelagic regime) pada tahun 1979. Dikatakannya bahwa berbuat demikian PNG akan berusaha membuat ketentuan yang memadai (adequate provision) mengenai hak-hak lalu lintas (transit rights) bagi kapal-kapal serta pesawat-pesawat terbang asing, sesuai dengan garis-garis yang telah disarankan dalam teks yang dibuat pada Konperensi Hukum Laut. Kedua menteri menunjukkan kepuasannya, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai negara-negara kepulauan ternyata telah diterima sepenuhnya pada konperensi tersebut. Prof. Mochtar Kusumaatmadja berkata, bahwa Indonesia akan bersenang hati memberikan kepada PNG hasil-hasil pengalamannya memajukan pengertian perairan kepulauan (archipelagic waters), suatu pengertian yang diajukan oleh Indonesia pada tahun 1960."

Bagian teks yang berikutnya ini mengenai persoalan daerah perbatasan yang begitu rawan itu, terutama mengenai pelintasan perbatasan serta penggunaan perbatasan untuk suaka oleh oknum-oknum yang anti-Indonesia (yang terutama dimaksudkan di sini ialah OPM). Sementara itu, kepentingan penduduk setempat — yang sudah bergenerasi-generasi menjadi penghuni daerah perbatasan itu diprioritaskan, untuk saling berkunjung sanak-saudaranya ataupun mencari penghidupan sehari-hari, secara berladang ataupun berburu binatang hutan. Konon kabarnya oleh petugas setempat mereka

diberikan kartu nama, supaya mudah dikontrol oleh patroli-patroli perbatasan.

"Sebelum mengakhiri pertukaran pikiran mereka mengenai perkara-perkara bilateral (bilateral matters), kedua menteri mengatakan dengan kepuasan yang besar, bahwa adanya perbatasan bersama dan persoalan orang-orang yang melintasi perbatasan tidak akan lagi dibiarkan menjadi sumber gesekan antara kedua negara."

#### Kemudian:

"Mr. Olewale mengulangi, bahwa Pemerintah PNG berniat menjaga jangan sampai wilayahnya dipergunakan sebagai tempat suaka oleh unsur-unsur yang memusuhi Indonesia. Kedua menteri setuju, bahwa dalam merencanakan peraturan-peraturan baru mengenai perbatasan, prioritas pertama haruslah kesejahteraan penduduk tradisional yang hidup di daerah itu."

Selanjutnya pihak Indonesia memberikan penjelasan mengenai pengelompokan regional ASEAN yang rupanya diutamakan oleh Indonesia:

"Dengan mengalihkan pembicaraannya kepada isu-isu regional, Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan keterangan yang terperinci mengenai tujuan-tujuan dan cara-cara bagaimana ASEAN itu bekerja. Dikatakannya bahwa akan diakui negara-negara ASEAN secara ekonomis tergolong salah satu daerah yang berkembang paling cepat didunia. Dia menyatakan keyakinannya bahwa perhimpunan ini akan bekerja secara efektif untuk memenuhi keperluan kawasan dan penduduknya. Dikatakannya pula bahwa ASEAN merupakan salah satu dasar (cornerstone) politik luar negeri Indonesia."

Pihak PNG menyambutnya dengan keterangan tentang pengelompokannya dengan SPF dan SPEC (South Pacific Bureau for Economic Co-operation):

"Mr. Olewale menjawab dengan memberikan suatu ikhtisar mengenai keterlibatan (involvement) PNG dalam soal-soal Pasifik, dan perkembangan Forum (South Pacific Forum) serta South Pacific Economic Community (SPEC = Masyarakat Ekonomi Pasifik Selatan) sebagai tujuan-tujuan utama (focal points) daripada solidaritas (solidarity) yang sedang berkembang di kawasan Pasifik Selatan. Dia menyebutkan harapan PNG, bahwa proses dekolonisasi akan berjalan terus di seluruh kawasan Pasifik. Kedua menteri menyatakan saling pengertian mereka — selaku tetangga yang dekat — mengenai peranan yang dimainkan mereka di daerah masing-masing."

Akhirnya Prof. Mochtar mengungkapkan tentang perkembangan-perkembangan di Asia Tenggara belakangan ini, di mana dipergunakannya istilah-istilah "Balance and Stability":

"Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Mr. Olewale menaruh perhatian — menjelaskan pandangan Indonesia tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di Asia Tenggara baru-baru ini, dan implikasi-implikasinya bagi perimbangan dan stabilitas dalam daerah yang lebih luas lagi, yang diharapkan oleh kedua negara dapat dipertahankan."

Perkembangan selanjutnya dapatlah kita lihat dalam suatu "Press Release No. M 92/97, tertanggal 18 Oktober 1979" yang dikeluarkan



oleh "Department of Foreign Affairs and Trade, Central Government Offices, Waigani" — yakni Departemen Luar Negeri PNG di Port Moresby — yang berjudul "Joint Statement by Delegation Leaders at the Third Round of Talks between Indonesia and Papua New Guinea on the Review of the Treaty on their Common Border" yang dimuat di sini dengan seluruhnya:

"Naskah persetujuan baru antara Indonesia dan PNG mengenai administrasi perbatasan bersama mereka diparaf oleh para pemimpin delegasi di Port Moresby hari ini. Perundingan yang ketiga kalinya ini dilangsungkan dalam suasana persahabatan dan kerja sama seperti halnya dengan kedua perundingan yang sebelumnya itu di Jakarta dan Port Moresby pada tahun ini juga. Perundingan menghasilkan suatu rancangan persetujuan (draft agreement) yang sekarang dengan lebih wajar (more properly) mengungkapkan meningkatnya pengertian dan persaudaraan yang terdapat antara PNG dan Indonesia, dan keinginan kedua negara untuk bekerja sama dalam pemerintahan dan pembangunan daerah perbatasan untuk kepentingan penduduk yang tinggal di daerah situ. Persetujuan ini diharapkan akan ditandatangani tahun ini juga, dan akan mulai berlaku setelah diratifikasi, sesuai dengan syarat-syarat konstitusional negara masing-masing. Beberapa di antara pokok-pokok utama yang tercakup dalam persetujuan ini adalah:

- Pelestarian (preservation) hak-hak adat oleh penduduk daerah perbatasan untuk melintasi perbatasan guna maksud-maksud tradisional;
- Kerja sama untuk mengembangkan daerah perbatasan dengan titik beratnya diletakkanlah terutama pada pengembangan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya dengan mengingat, bahwa daerah perbatasan adalah jauh letaknya dari pusat-pusat utama (main centres) kedua negara dan memerlukan perhatian yang istimewa;
- Memperbaiki (up grade) pengawasan Karantina dan kesehatan di perbatasan, selama ada pembangunan guna mencegah jangan sampai persoalan-persoalan di wilayahnya masing-masing dipindahkan ke bagian daerah perbatasan pihak yang lain;
- Mendirikan perhubungan lintas perbatasan yang lebih baik, termasuk perhubungan udara yang lebih baik;
- Memperbaiki prosedur-prosedur hubungan (liaison procedures) untuk menangani administrasi perbatasan secara rutin;
- Pelayaran bebas di Sungai Fly dan pemakaian sungai-sungai perbatasan lainnya untuk perkembangan nasional negara masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas pelayaran;
- Membentuk Komisi Perbatasan Bersama untuk menjamin implimentasi persetujuan secara efektif.

Perundingan dilangsungkan juga mengenai rancangan persetujuan (draft agreement) untuk perbatasan laut dan dasar laut (seabed) di daerah sebelah utara Pulau New Guinea (Irian). Diharapkan bahwa persetujuan ini akan diselesaikan di waktu yang dekat."

Pada bulan Juni 1979 persaudaraan antara kedua bangsa diresmikan dengan kedatangan Presiden Soeharto di Port Moresby. Mengingat di ibukota PNG ada kelompok-kelompok yang kurang suka kepada Indonesia, maka persiapan keamanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah PNG tidak tanggung-tanggung. Sebuah mobil kebal peluru

diterbangkan dari Australia dengan ongkos 1 juta Kina (K sama dengan Rp. 1 milyar), 4 buah helikopter beterbangan di atas dan sekitar Jackson airport sewaktu rombongan Presiden mendarat, dan pada setiap 50 meter di sepanjang jalan yang dilalui rombongan ditempatkan seorang prajurit PNG.

Hal penting yang sementara itu dapat kita lihat ialah pembangunan di daerah perbatasan masing-masing. Sejak beberapa tahun berselang PNG telah mulai dengan pembangunan daerah perbatasannya dengan membuka proyek-proyek pertanian, antara lain persawahan padi di sebelah utara. Untuk tahun 1979 telah didrop uang K 900.000 (= Rp. 900 juta) untuk pembangunan pertanian di sepanjang perbatasannya, sedangkan untuk tahun 1980 telah disediakan uang K 1,45 juta. Sampai di mana usaha Indonesia yang paralel telah dilakukan, hal ini masih belum diketahui. Menurut keterangan seorang tokoh DPRD di Jayapura yang diucapkannya kepada saya pada bulan Nopember 1979, pembangunan sebuah jalan di sepanjang perbatasan dipertimbangkan, tetapi karena penghuninya amat sedikit — diperkirakan hanya berjumlah 10 ribu orang yang hidupnya tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, maka efektifnya rencana ini disangsikan, dan idenya dibatalkan.

Selama ini yang telah dikerjakan oleh pemerintah daerah Irian Jaya sejak beberapa lama ialah latihan Pelopor Pembangunan dengan melatih putera-putera daerah, yang berasal dari daerah perbatasan, beberapa kepandaian bercocok tanam dan mengirimkan mereka kembali ke desanya masing-masing dengan membekali mereka beberapa alat pertanian. Tetapi usaha ini masih dilakukan secara kecil-kecilan. Setahu saya, usaha ekonomi lainnya yang sedang dilakukan di daerah perbatasan Irian Jaya ialah yang sedang dilakukan di daerah perbatasan Irian Jaya ialah usaha produksi dan pemasaran karet di daerah dekat Mindiptana, Kabupaten Merauke. Pohon-pohon karetnya yang ditanam oleh Belanda sebelum Perang Dunia II dan selanjutnya tumbuh dengan leluasa dan tidak terganggu, sekarang matang untuk disadap. Persoalannya dahulu ialah pemasarannya. Sekarang soal ini serta pengangkutannya telah dapat diselesaikan dan putera daerah — kebanyakan dari suku Muyu yang berdiam di daerah perkebunan getah itu — dapat menikmati hasilnya.

Di hari-hari mendatang ini yang akan sangat berpengaruh kepada perkembangan di perbatasan adalah pertambangan Ok Tedi yang terletak di wilayah PNG. Lokasinya di Star Mountains yang merupakan kelanjutan daripada gugusan pegunungan yang membujur barat-timur di tengah-tengah Irian Jaya, maka Ok Tedi — serupa

dengan Tembagapura (Ertsberg) di Irian Jaya merupakan gumpalan raksasa yang mengandung bijih-bijih emas dan tembaga. Penyelidikannya telah selesai, hanya tinggal menanti produksi saja. Bilamana mesin perusahaan pertambangan Ok Tedi sudah mulai berputar, pasti akan menyedot banyak pegawai, kaum teknik dan buruh dari mana-mana, terutama dari PNG sendiri. Karena letaknya dekat perbatasan, maka pasti akan menarik tenaga pekerja dari daerah Irian Jaya pula. Apalagi bagi penghuni pedalaman sekitar Ok Tedi ini adalah satu-satunya cara untuk mencari uang dan menambah penghasilan. Tetapi juga dari lain daerah Irian Jaya — di mana pencarian hidup menjadi semakin sulit bagi putra daerah — orang akan mencoba untuk datang ke Ok Tedi dengan melintasi perbatasan. Apalagi dalam fase pertama pembangunan di mana perusahaan pertambangan raksasa ini akan memerlukan banyak tenaga kasar. Daerah sekitar Ok Tedi akan terbawa dari jaman purbakala ke abad 20 dalam ekonomi uang (money economy) yang akan mempunyai rupa-rupa akibat (repercussions) pada kehidupan penduduk setempat. Kesemuanya ini akan mengakibatkan terjadinya suatu "economic and social disequilibrium" (ketidakseimbangan ekonomi dan sosial) antara daerah perbatasan sebelah PNG dan sebelah Indonesia.

Ok Tedi hanya merupakan salah satu proyek pembangunan perbatasan. Secara keseluruhan Pemerintah PNG rupanya dengan tidak tanggung-tanggung hendak membangun perbatasannya. Menurut "Post-Courier", surat kabar yang terpenting di PNG tertanggal 6 Desember 1979 pada halaman 10 disebutkan, bahwa "Pemerintah PNG mempunyai rencana membelanjakan hampir K 4,5 juta untuk 4 tahun yang mendatang ini (1980—1984) untuk membangun fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa (services) di daerahnya yang berbatasan dengan Irian Jaya". Untuk 1980 dialokasikan K 1,45 juta: K 796.000 untuk proyek-proyek di West Sepik Province, dan K 614.000 di Western Province. Kedua propinsi ini sebelah-menyebelah dengan Irian Jaya. K 40.000 dialokasikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan yang mengkoordinasi programnya.

Menurut surat kabar tersebut "Rencana 1980 akan meliputi pembuatan jalan, perumahan di luar kota, dana-dana patroli, pengangkutan, perhubungan, prasarana karet dan perikanan, perahu untuk Sungai Sepik, sumur-sumur air dan suplai medis". NPEP (National Public Expenditure Plan, ialah Badan Pemerintah untuk pembelanjaan Uang Negara) — demikianlah "Post-Courier" selanjutnya, menyatakan "Strategi dasar yang telah diterima untuk program pembangunan daerah perbatasan ialah pertama membangun

praminimum untuk pemerintah dan pembangunan ekonomi, dan kemudian memberikan bantuan yang luas kepada kegiatan-kegiatan agro-ekonomi dan pencegahan penyakit-penyakit", kemudian, "salah satu dari tujuan rencana itu ialah menjamin agar supaya pembangunan di kedua sisi perbatasan berimbang guna memperkecil risiko arus pengungsi yang besar dan kegiatan pembangkangan. Rencana ini akan berkisar pada keamanan, kesehatan dan karantina dalam keadaan daerah perbatasan yang terbuka".

Perlu dicatat di sini, bahwa kelak arus manusia yang datang dari mana-mana dari Irian Jaya — yang ingin mencari pekerjaan di sebelah PNG, tidak mungkin dapat dibendung dengan pos-pos penjagaan dan peraturan-peraturan saja, dan Indonesia akan menghadapi tugas yang maha sukar untuk mencegah jangan sampai hal yang demikian itu terjadi, jikalau "perkembangan di kedua belah pihak perbatasan tidak berlangsung secara seimbang".

Betapa luasnya proyek-proyek pembangunan — yang akan dilangsungkan oleh PNG di daerah perbatasannya ini, terungkaplah dalam surat kabar "Post-Courier" tersebut sebagai berikut:

"Rencana ini menyebutkan, bahwa salah satu dari tujuan-tujuan programa pembangunan ialah mempersiapkan penduduk untuk kemungkinan pengembangan sumber-sumber daya utama, seperti kayu di Vanimo, tembaga di Tifalmin, Busilmin, Frieda dan Ok Tedi.

Paling tidak tiga tahun kerja — pada tingkat 1980 yang telah disarankan — akan diperlukan untuk mencapai terlaksananya pemerintahan dengan kapasitas untuk memerintah dan mengembangkan daerah perbatasan secara efektif."

Mungkinkah pembangunan daerah perbatasan PNG ini merupakan jawaban PNG terhadap usaha Repelita yang sekarang sudah masuk tahap ketiganya? Ataukah usaha PNG ini merupakan tantangan bagi pihak Indonesia untuk juga ikut membangun daerah perbatasannya yang sampai sekarang kurang diperhatikan?

Menilik proporsi pembangunan oleh PNG — dibandingkan dengan kenyataan sekarang di perbatasan sebelah Indonesia — dalam tiga tahun yang mendatang ini, kita akan melihat "economic and social disequilibrium" antara daerah perbatasan PNG dan Indonesia semakin membesar — suatu hal yang akan kurang menguntungkan bagi Indonesia, jikalau Indonesia sendiri tidak berusaha untuk mengatasi "disequilibrium" ini dengan usaha-usaha yang sebanding.

Malahan ada kemungkin besar, bahwa akhirnya akibat perkembangan ekonomi-sosial yang sepihak, stabilitas politik di daerah perbatasan ini menjadi terganggu pula.